

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terbitnya PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menandakan adanya reformasi bidang akuntansi pemerintahan. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan Negara dengan informasi Laporan Realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sekaligus mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, dan aset yang terjadi di lingkungan SKPD. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Dengan adanya tuntutan itu maka pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan ideal apabila laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan juga bisa dipertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh

entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dari berbagai hasil penelitian terdahulu, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK RI dalam pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah. Permasalahan yang sering ditemukan diantaranya terkait 1) Kesalahan kode rekening anggaran, 2) Perjalanan dinas pembayaran ganda, 3) Kekurangan volume pekerja/kelebihan pembayaran, 4) Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan dan pelaporan yang kurang memadai, dan 5) Kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah, dikutip dalam berita acara (<https://www.redaksi9.com> 2018).

Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini BPK RI untuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2015 sampai 2019 cukup memuaskan, namun masih banyak LKPD kabupaten/kota yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk wilayah kota Denpasar berdasarkan data diperoleh informasi yang menunjukkan opini audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015-2019

Tahun	Opini Audit
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <https://bali.bpk.go.id/>

Penilaian berupa opini ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor penting untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tertera pada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sekaligus merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pelaksanaan standar akuntansi pemerintah merupakan keharusan karena merupakan dasar-dasar akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan pemerintah untuk proses

meningkatkan mutu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Beberapa penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara SAP dengan kualitas laporan keuangan diantaranya, Putra (2017) menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Penelitian Neneng dan Arinda (2019) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Ardianto dkk (2019) telah melakukan penelitian yang serupa dan membuktikan bahwa tingginya penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan serta untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Bagian yang bersangkutan seperti bagian akuntansi dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas.

Beberapa penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara SIA dengan kualitas laporan keuangan diantaranya, Lazwardi (2019), Suprihatin dan Arinda (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan

penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena jika penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan semakin baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Adapun penelitian Ulfa (2019) menunjukkan sistem informasi akuntansi mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Zulfah dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang kuat karena kemampuannya untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Peran audit internal merupakan salah satu kunci dalam unit pemerintahan yang memiliki keahlian untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan dalam anggaran serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Audit internal sendiri dalam hal ini sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) sangat penting dalam membantu komitmen kepala daerah untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Standar Audit AAIFI, 2014). Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana untuk menjamin laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan standar yang ada maka diperlukan adanya audit internal yang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Lembaga pengawasan internal sendiri terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Beberapa penelitian mengenai peran audit internal sudah dilakukan diantaranya Sari dkk (2020) menyatakan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Syahrial (2017) dan Windasari (2018), menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kurniawan dkk (2017) menyatakan kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi dengan adanya Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sebagai parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja menurut peraturan menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dan pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian Ritonga (2020) menyatakan perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian Hayati dan Rosini (2019) menyatakan pengawasan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian pada kota Denpasar Provinsi Bali tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar ?
- 2) Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar ?
- 3) Apakah Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar ?
- 4) Apakah Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris terhadap teori keagenan yaitu hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya *information asymmetry*, dan *conflict of interest* akibat ketidaksamaan tujuan, antara manajemen dengan *principle*. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap laporan keuangan yang baik, mampu mengkoordinasikan dan

mengkomunikasikan semua kepentingan sehingga dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

2) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk pihak praktisi adalah diharapkan sebagai bahan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Peran Audit Internal, Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta sebagai perbandingan, penyempurnaan dari penelitian-penelitian terdahulu, dan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang berasal dari studi kepustakaan kemudian disusun rapi, dan sistematis sesuai dengan variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teori*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai prinsipal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara

pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikatakan adanya hubungan keagenan. Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) juga menjadi lebih kecil.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas didefinisikan oleh Goesth dan Davis sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Mulyana (2017) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas baik dari segi yang berwujud, seperti suatu kegiatan.

Laporan keuangan merupakan hasil atau *output* dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan artian dari pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi ini menjadi lebih efektif, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi

karakteristik dasar meliputi mudah dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010 yaitu:

1) Relevan

Relevan apabila informasi yang termuat didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi, memprediksi, serta menegaskan hasil evaluasi baik dimasa lalu atau masa kini. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2) Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus terbebas dari kesalahan baik itu berupa kualitatif maupun kuantitatif, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ke tahun sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat Dipahami

Laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dengan asumsi pengguna memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan selama satu periode harus disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah yang merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Terdapat 12 penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu:

1) PSAP No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Mengatur dan menyajikan laporan keuangan sekaligus mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik.

2) PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, dengan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) PSAP No. 3 Tentang Laporan Arus Kas.

Memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4) PSAP No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.

Meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5) PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan.

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6) PSAP No. 6 Tentang Akuntansi Investasi.

Mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7) PSAP No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap.

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8) PSAP No. 8 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

9) PSAP No. 9 Tentang Akuntansi Kewajiban.

Mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10) PSAP No. 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

Mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11) PSAP No. 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan sekaligus meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12) PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional.

Memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan serta untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar kemampuan mengelola keuangan daerah dapat meningkat serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah dan Muid 2016).

2.1.5 Peran Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan independen dan obyektif yang dilakukan auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dimana merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain, dan konsultasi (*consulting activities*) merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu audit internal harus tetap menjaga objektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Auditor merupakan pihak yang memegang peran utama dalam pelaksanaan audit karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan

informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen.

Auditor internal melakukan operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 2) risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi, 3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, 4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, 5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan 6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

2.1.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan

keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah dan laporan keuangan daerah, peranan Bawasda (Badan Pengawas Daerah) lebih ditekankan untuk memastikan sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar. Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota.

Sebagai parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 Perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dan pendapatan dan belanja daerah.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Trisna Dewi (2020) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan dan variabel independen Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada BPKAD Kabupaten Badung, menggunakan teknik *purposive sampling*, jumlah responden sebanyak 60 orang, dengan teknik analisis data regresi linier berganda menggunakan bantuan *software SPSS 20 for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal masing-masing berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh

Trisna Dewi (2020) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel independen dan teknik *purposive sampling* serta teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan pada beberapa variabel independen, lokasi penelitian dan jumlah responden.

Penelitian Lisnawati (2019) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada 37 Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan populasi sebanyak 45 Organisasi Perangkat Daerah. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masing-masing berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen dan teknik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan pada beberapa variabel independen, lokasi penelitian, jumlah populasi dan jumlah responden.

Penelitian Syahrial (2017) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan variabel independen Peran Audit Internal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan membagi kuesioner kepada 85 pegawai yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS versi 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial (2017) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen dan Peran Audit Internal sebagai variabel independen. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, jumlah variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian dan jumlah responden.

Penelitian Haza (2018) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel independen Pemanfaatan Teknologi, Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Padang, menggunakan teknik *purposive sampling*, jumlah sampel 45 responden, dengan teknik analisis regresi linier berganda dan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah masing-masing berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Haza (2018) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Pengawasan Keuangan Daerah sebagai variabel independen,

teknik *purposive sampling* dan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan pada salah satu variabel independen sekaligus jumlah variabel yang digunakan, lokasi penelitian dan jumlah responden.

Penelitian sebelumnya oleh Fikri dkk (2016) dengan variabel dependen Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan variabel independen Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 SKPD Pemprov NTB, menggunakan teknik *purposive sampling*, jumlah sampel 100 responden, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal masing-masing berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri dkk (2016) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai variabel dependen, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Audit Internal sebagai variabel independen, teknik *purposive sampling* dan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan pada salah satu variabel independen, lokasi penelitian, jumlah populasi dan jumlah responden.

Penelitian Zulfah dkk (2017) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara dan variabel independen Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah 63 SKPD Kab. Aceh Utara, menggunakan teknik sampling instrumen angket, jumlah sampel 98

responden, dengan teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang kuat (positif) dengan kualitas pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfah dkk (2017) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen dan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel independen. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, jumlah variabel yang digunakan, jumlah populasi serta responden, lokasi penelitian dan teknik sampling yang digunakan.

Lazwardi (2019) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan dan variabel independen Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan teknik sampling sampel jenuh, jumlah sampel 48 responden dan teknik analisis *verifikatif deskriptif* dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia masing-masing berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lazwardi (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Adapun pembeda dalam penelitian ini diantaranya, perbedaan pada variabel independen serta jumlah variabel yang digunakan, lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, teknik sampling dan analisis yang digunakan.

Arinda (2019) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan dan variabel independen Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Serang, menggunakan teknik sampling *Software Partial Least Square* (PLS), jumlah sampel 30 responden, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan SAP dan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Arinda (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel independen dan teknik yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaan dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan jumlah variabel yang digunakan, lokasi penelitian, jumlah populasi serta responden dan teknik sampling yang digunakan.

Ritonga (2020) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan dan variabel independen Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 OPD Kecamatan Dolok Sigompulon, menggunakan teknik *Purposive Sampling*, jumlah sampel 60 OPD Kecamatan Dolok Sigompulon, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah masing-masing berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2020) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen, Pengawasan Keuangan Daerah sebagai variabel independen, teknik *Purposive Sampling* dan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan. Adapun

pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, perbedaan pada salah satu variabel independen serta jumlah variabel yang digunakan, lokasi penelitian, jumlah populasi dan responden.

Saputri dkk (2020) dengan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel independen Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan. Populasi pada penelitian kali ini adalah 14 OPD Kota Malang, menggunakan teknik *Purposive Sampling*, jumlah sampel 71 responden, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan masing-masing berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dkk (2020) memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan SIA dan Pengawasan Keuangan sebagai variabel independen, teknik *Purposive Sampling* dan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan. Adapun pembeda dalam penelitian kali ini diantaranya, jumlah variabel yang digunakan, lokasi penelitian, jumlah populasi serta sampel.